



Utang Pemprov Tersisa Rp60 M

Utang Pemprov Tersisa Rp60 M

DBH Masih Tertahan Delapan Bulan

REPORTER MUH MUCHTASIM
EDITOR YUKEMI KOTO

MAKASSAR, FAJAR — Pemprov Sulsel segera melunasi utang pihak ketiga. Hingga Desember ini, sisa Rp60 miliar belum terbayarkan.

UTANG-utang tersebut merupakan akumulasi proyek tahun 2023 dan 2024. Di awal 2024, utang tersebut bahkan masih berada di angka tidak kurang dari Rp600 miliar.

Pemprov Sulsel kemudian melakukan penghematan besar-besaran serta refocusing anggaran di hampir seluruh Orga-

nisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya, utang bisa dibayar sedikit demi sedikit.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Salehuddin mengatakan, sisa utang pihak ketiga yang harus dibayarkan oleh Pemprov adalah Rp60 miliar.

❖ Baca Utang... Hlm 11

Utang Pemprov Tersisa Rp60 M

❖ Lanjutan Halaman... 9

Pemprov telah menganggarkan seluruh utang pihak ketiga tahun ini. Sebabnilainya yang cukup besar dan tidak bisa dialihkan seluruhnya ke APBD Perubahan, maka digunakan skema penerbitan dua kali SK Parsial.

"Per 29 November ke, itu Rp60 miliar. Itu parsial 1 masih ada, parsial 2 masih ada. Parsial 1 kalau tidak salah Rp13 miliar, sisanya di parsial 2," terang Bobby, sapaannya, Rabu, 4 Desember.

Ia menyebut, ketersediaan anggaran untuk pembayaran sisa utang tersebut masih ada. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah kelengkapan dokumen dari penyedia yang dibutuhkan oleh OPD terkait.

Kata Bobby, OPD bersangkutan tidak akan membayarkan utang tersebut kepada pihak ketiga jika dokumen tidak lengkap. Sebab, pertanggungjawabannya pada OPD tersebut.

Misalnya sisa utang Rp13 miliar pada parsial

1, masih ada dokumen yang belum dilengkapi oleh penyedia. Sehingga, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel, belum membayarkannya.

"Intinya dokumen. Rata-rata kalau saya tanya, belum ada dokumen dilengkapi. Ada juga jaminan pelaksanaan mati. Itu juga," tandasnya.

Bobby mengatakan, Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh juga setiap pekan mengingatkan kepada OPD yang masih menyimpan utang untuk

segera menyelesaikannya. Jangan sampai, kata ia, dokumen terlambat dimasukkan dan batal terbayarkan tahun ini.

"Saya sudah ingatkan. Ada kejadian tahun lalu. Utang 2022 baru masuk di 31 Desember, belum sempat dibayarkan," beber Bobby.

Bobby menyebut para kepala OPD tidak akan mengambil risiko untuk membayarkan utang jika penyedia tidak memenuhi kelengkapan dokumen. Jika tidak, maka pembayaran akan kembali

menyeberang ke APBD 2025.

"Bisa dibayar tahun depan. Tapi kan, jangan, harus tahun ini. Intinya Pak Gub tiap pekan (saat) apel ingatkan," tukasnya.

Selain utang pihak ketiga, Pemprov Sulsel juga masih punya utang kepada pemerintah kabupaten/kota. Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 belum sepenuhnya disalurkan ke 24 daerah.

"Baru sampai bulan empat (April) semua kabupaten/kota. Rata-rata perbulan bervariasi, Rp119 miliar sampai dengan Rp146 miliar," ungkap Bobby.

Untuk DBH tersebut, sebagian besar akan dibayarkan tahun depan. DBH sisa tahun ini dan DBH 12 bulan di tahun depan sudah dianggarkan pada APBD 2025.

Pj Gubernur Sulsel

Prof Zudan Arif Fakrulloh memaparkan, upaya mewujudkan APBD sehat, relokasi anggaran dilakukan. "Kita melakukan penataan dan menyusun skala prioritas, yang mana yang mendesak harus dibayar. Lalu, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi belanja-belanja yang tidak urgen, kita lakukan itu. Alhamdulillah mulai membaik," pungkasnya. (*)